

PROTES BURUH : PELUANG DAN MASALAH¹

Oleh : Hari Nugroho

Pengantar

Sejarah awal dinamika ekonomi politik Indonesia diantaranya ditandai oleh sangat maraknya konflik-konflik industrial sepanjang tahun 1950an. Akhir 1950an hingga 1980an situasinya menjadi relatif lebih tenang sejalan dengan semakin menguatnya kontrol negara terhadap aktivisme perburuhan khususnya di hampir seluruh periode kekuasaan Soeharto. Gelombang aksi industrial baru mulai muncul kembali pada awal tahun 1990an. Di mulai dari tahun 1990 eskalasi gejolak industrial mengalami peningkatan yang cukup tajam dan mencapai puncaknya pada tahun pertengahan 1990an. Sesudah puncak tersebut gelombang pemogokan dan demonstrasi buruh mengalami penurunan sedikit dan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Namun secara umum eskalasi rata-rata per tahun masih relatif lebih tinggi dibanding periode tenang sebelum 1990.

Gambaran tersebut berbeda dengan kecenderungan pola aksi industrial di tingkat internasional yang memperlihatkan penurunan yang relatif tajam. Penurunan tersebut sudah terlihat sejak periode 1980an (lihat lampiran). Trend semacam ini potensial mempengaruhi pola gelombang konflik industrial di Indonesia. Terintegrasinya sistem perekonomian nasional Indonesia ke dalam sistem kapitalisme global memungkinkan pola tersebut terjadi. Konvergensi dalam model praktek hubungan industrial yang dibawa oleh modal asing ditopang oleh tekanan kompetisi pasar yang sangat kuat serta model kebijakan negara dalam mengatur situasi ketenagakerjaan sangat mungkin mempengaruhi pola konflik industrial yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian pengaruh global ini juga tidak dapat mengesampingkan karakteristik historis maupun struktur ekonomi politik lokal atau nasional yang turut membentuk dinamika konflik industrial di Indonesia. Tarik-menarik di antara kekuatan global dan lokal itulah yang akan memberi pengaruh cukup signifikan pada pola konflik industrial dan protes buruh di Indonesia.

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut ada sejumlah pertanyaan yang menarik untuk diajukan. Beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana peluang protes perburuhan yang berbentuk aksi kolektif ini pada masa kini dan yang akan datang dengan memperhatikan sejarah gelombang pemogokan di Indonesia? Apakah pemogokan masih tetap merupakan suatu bentuk aksi kolektif yang strategis? Kondisi apa sajakah yang potensial menyebabkan tererosinya bentuk-bentuk protes buruh yang berbentuk aksi-aksi kolektif terbuka - sebagaimana juga terjadi di tingkat internasional? Seberapa jauh alternatif bentuk protes atau tindakan kolektif lain dapat menggantikan fungsi pemogokan?

¹ Makalah disampaikan dalam International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia, Juli 12-15 2005. Universitas Indonesia, Depok.



Makalah ini membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam konteks hubungan industrial di Indonesia. Uraian akan mendeskripsikan anatomi aksi industrial di Indonesia secara historis dan mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi danambatannya. Selanjutnya diskusi diarahkan juga untuk menjelaskan peluang dan masalahnya yang ada pada masa kini dan kemungkinan masa yang akan datang.

Peta perjalanan & anatomi aksi industrial di Indonesia

Sebagaimana diyakini oleh sejumlah penulis dalam studi-studi mereka, gelombang-gelombang aksi kolektif buruh – biasanya diukur melalui tingkat pemogokan – berikut fluktuasinya tidak hanya merupakan sebuah trend statistik tetapi juga mencerminkan sebuah pola dari gerak dinamika konflik industrial serta kekuatan-kekuatan yang tersembunyi maupun manifes dari pergerakan perburuhan². Tentu saja tidak ada jaminan baik secara teoritis maupun empiris bahwa tingginya tingkat pemogokan menggambarkan kekuatan riil dari gerakan perburuhan (REF). Kekuatan riil buruh memiliki dimensi yang sangat kompleks. Meskipun demikian, gelombang-gelombang aksi industrial setidaknya mencerminkan sejauh mana kolektivisme buruh – sebagai salah satu sumber kekuatan penting bagi buruh – terbangun secara historis di dalam dinamika konflik industrial.

Sejarah dari aksi-aksi industrial yang berlangsung di Indonesia dapat ditelusuri hingga ke periode kolonialisme. Meskipun periode ini secara politik berbeda dengan periode kemerdekaan, namun bentuk dari aksi-aksi industrial diantara kedua periode tersebut tetap mempunyai pertalian historis. Pola organisasi dari gerakan pemogokan dan bentuk-bentuk perlawanan buruh dari masa ke masa tidak dapat dilepaskan dari bagaimana dibangunnya organisasi-organisasi yang berkaitan dengan kepentingan buruh, pembentukan kesadaran dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik industrial tentang konflik itu sendiri, serta pola hubungan riil di antara aktor-aktor tersebut.

Periode kolonialisme

Konflik industrial yang terjadi pada periode ini merupakan konflik yang berkembang di atas suatu tatanan sosial yang majemuk tanpa suatu ikatan politik formal kebangsaan serta sangat sarat dengan pengaruh isu-isu kolonialisme. Oleh karenanya protes dan perlawanan buruh terhadap pemilik modal pada masa ini memiliki dimensi berganda. Di satu sisi aksi-aksi industrial yang berbentuk pemogokan merupakan sebuah bentuk empirik dari konflik dalam hubungan produksi³. Di sisi lain, aksi-aksi tersebut juga merupakan sebuah perlawanan politik dan kelas sosial terhadap kolonialisme yang hingga tingkat tertentu juga tidak terlepas dari ikatan-ikatan primordial. Meskipun demikian

² Biasanya statistik aksi industrial diukur hanya melalui aksi yang berbentuk pemogokan. Bentuk aksi seperti ini relatif mudah diukur secara empirik baik gejalanya, cakupannya, dan dampaknya. Meskipun demikian bentuk-bentuk protes buruh yang bersifat kolektif lainnya seperti slow-downing, sabotase, penolakan untuk bersikap kooperatif, menolak lembur, demonstrasi pada dasarnya juga merupakan bagian dari konsep aksi tersebut (Salamon, 1992).

³ Kasus-kasus kebakaran perkebunan tebu yang sempat marak pada awal 1900an di Jawa tengah dan timur tidak dapat dilepaskan dari gejala protes buruh industri gula terhadap proletarianisasi yang dialami oleh mereka di dalam sistem industri gula kolonial.



melalui wadah organisasi-organisasi kepentingan ekonomi, aksi-aksi kolektif ini perlahan-lahan memunculkan bangunan kesadaran tentang konsep bangsa. Bangkitnya nasionalisme tumbuh melalui kesadaran kolektif sebagai sebuah kelas dalam relasi produksi yang dibangun di atas sistem kolonialisme. Hal ini selanjutnya menjadi sumbu penting bagi gerakan perlawanan buruh terhadap modal kolonial.

Sektor produksi yang tercatat memiliki kasus protes dan perlawanan buruh yang cukup marak diantaranya adalah sektor industri gula (Sulistyo, 1995). Tidak terdapat suatu catatan statistik yang memadai mengenai besaran dari gerakan protes dan perlawanan buruh di sektor ini. Yang tercatat adalah bentuk-bentuk aksi-aksi industrialnya yang merentang dari protes biasa, pemogokan hingga pembakaran bahan baku produksi, yakni kebun tebu (Sulistyo, 1995).

Yang menarik adalah bahwa gerakan buruh pada sektor produksi gula tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara ekonomi modal di tingkat lokal (kolonial) dengan ekonomi pasar dan politik di tingkat internasional (Sulistyo, 1995). Wilayah-wilayah koloni seperti Jawa bagian tengah dan timur dijadikan oleh pemerintah kolonial sebagai basis sumber dan proses produksi yang menghasilkan gula untuk selanjutnya dipasarkan di Eropa. Kebanyakan sistem produksi yang dibangun dalam sistem ekonomi politik kolonial dilakukan dengan praktek eksploitasi yang menciptakan proletarianisasi luas di kalangan buruh-buruh industri serta sektor penunjangnya. Dampak yang dihasilkan melalui sistem hubungan produksi seperti ini melahirkan suatu gerakan perlawanan yang tidak hanya dilakukan oleh buruh pribumi saja tetapi juga oleh kelas menengah pribumi bahkan sekelompok kecil orang Belanda sendiri. Melalui keterkaitan antara gerakan politik anti kolonialisme dan gerakan-gerakan perlawanan ekonomi, mobilisasi kolektif berhasil dibangun cukup luas di kalangan buruh-buruh tersebut untuk melakukan protes dan perlawanan. Bahkan bentuk protes seperti pemogokan juga meluas kepada sektor-sektor lain yang menunjang sektor industri ini seperti pelabuhan dan perkereta-apian.

Bentuk gerakan protes dan perlawanan buruh ini muncul sebagai konkuensi logis dari berkembangnya model organisasi gerakan buruh yang juga sedang marak dalam dinamika ekonomi politik Eropa (Sulistyo, 1995; Supriyono, 2004)⁴. Adanya kelompok politik sosial demokrat Belanda yang mempunyai suara politik yang simpati terhadap kondisi pribumi di wilayah Hindia Belanda menjadi salah satu katalisator penting bagi pembentukan organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi-organisasi politik lokal yang berkaitan dengan gerakan buruh. Organisasi-organisasi seperti Adidarmo, SI, PFB, VIPBOW, PKBT, PPKB, ISDV adalah contoh dari beberapa organisasi mempunyai fungsi penting dalam gerakan ini. Organisasi-organisasi ini mengubah ikatan sosial yang semula berbasiskan hubungan primordial lokal menjadi ikatan-ikatan organisasional berdasarkan kepentingan ekonomi (Sulistyo, 1995; 80-81). Peran dari tokoh buruh seperti Suryopranoto dan Semaun memegang peran kepemimpinan yang penting dalam

⁴ Model gerakan protes dan perlawanan ini didukung oleh adanya model struktur organisasi gerakan perburuhan yang juga berkembang di Eropa. Sebagian organisasi dari gerakan tersebut mengambil bentuk serikat buruh, tetapi sebagian lain mengambil bentuk yang berkombinasi dengan gerakan keagamaan atau gerakan sosial ekonomi lainnya.



mobilisasi kolektif dan pembangunan kesadaran kelas sosial serta perlawanan terhadap kolonialisme yang masuk melalui sistem hubungan produksi⁵.

Meskipun demikian gejala-gejala industrial pada periode ini oleh beberapa penulis masih dianggap kurang berhasil dalam membangun kesadaran kelas pekerja yang efektif untuk menghadapi kolonialis sebagaimana terjadi di India dan Cina (Manning, 1993; 62). Tekanan politik kolonial dan lokal serta masih kuatnya basis primordialisme menjadi sebab utama dari kondisi tersebut. Pada tahun 1919, pemerintahan kolonial memang memberikan kelonggaran politik bagi pembentukan organisasi politik. Ini sebenarnya dapat menjadi struktur peluang yang sangat strategis bagi pembentukan kesadaran kolektif secara politik di kalangan buruh. Melalui peluang untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi di antara kelompok-kelompok yang semakin luas, maka sebuah gerakan sosial ekonomi berpeluang menjadi gerakan politik. Namun faksi-faksi yang sudah terbentuk di antara kelompok-kelompok buruh yang berhaluan radikal dengan haluan pluralis-unitaris pada akhirnya mengalami perpecahan.

Periode awal kemerdekaan - orde lama

Pada masa awal kemerdekaan di bawah sistem pemerintahan nasional yang baru pertama kali dibentuk, konflik industrial mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding pada masa kolonialisme. Hal ini menyusul adanya peningkatan pembangunan industri yang dibutuhkan bagi pengembangan dasar ekonomi nasional. Besarnya konflik industrial ini ditopang oleh lebih terorganisirnya gerakan buruh pada periode ini. Sekitar 2 juta (20% dari jumlah seluruh pekerja) merupakan anggota dari 13 federasi serikat buruh dimana SOBSI merupakan serikat buruh terbesar yang memiliki kurang lebih separuh dari seluruh jumlah anggota yang terdaftar tersebut (Manning, 1993: 62).

Dengan keanggotaan serikat yang besar ini, pola protes buruh menjadi lebih terorganisir di banding pada masa sebelumnya⁶. Besarnya sumbangan faktor organisasi ini pada gerakan pemogokan mengakibatkan pemogokan yang terjadi pada industri manufaktur besar atau industri pertambangan menjadi relatif lebih tinggi dibanding pada industri-industri yang lebih kecil yang mempekerjakan buruh dengan upah lebih rendah (Manning, 1993: 64). Gerakan buruh yang lebih terorganisir umumnya terdapat pada industri-industri besar dan dimiliki oleh modal asing. Bentuk aksi industrial yang paling dominan dilakukan adalah pemogokan dengan isu yang dominan adalah seputar upah dan kondisi kerja (Manning, 1993, 63).

Aksi-aksi industrial ini memperoleh peluang dengan adanya sikap politik dari pemerintah yang relatif bersifat protektif terhadap kepentingan buruh khususnya pada periode

⁵ Pemimpin dalam gerakan kolektif yang berbentuk pemogokan memegang peranan penting untuk mengartikulasikan kepentingan dan wacana keluhan serta memobilisasi massa di dalam satu kepentingan (Hyman, 1974 & Kelly, 1998).

⁶ Hyman mengemukakan bahwa aksi industrial yang dibangun secara terorganisir akan berpeluang untuk berhasil dalam mobilisasi kolektifnya. Buruh-buruh terampil dan industri besar umumnya dijumpai potensial untuk menggalang sebuah gerakan kolektif yang lebih terorganisir (Hyman, 1974).



sebelum 1957 (Manning, 1993). Kecenderungan ini terlihat dari kebijakan-kebijakan negara tentang hak untuk berserikat, hak mogok, pembatasan jam kerja, hak cuti dan hak lain-lainnya. Namun demikian ketika ketidakstabilan politik yang diikuti oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah mulai mengubah orientasi kebijakannya dalam hubungan industrial. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang cenderung membatasi peluang pemogokan. Pada saat yang sama pemerintah juga membangun institusi-institusi penyelesaian perselisihan perburuhan melalui UU no.22/1957. Penggunaan kekuatan militer untuk mengontrol radikalisme dan gerakan buruh dilakukan dengan menyusun organisasi BKS-BUMIL.(Manning, 1993). Mendekati akhir tahun 1950an, kebijakan-kebijakan ini terbilang sangat efektif dalam mengontrol gelombang pemogokan secara luas (lihat lampiran grafik).

Dilihat dari pola gerakannya, pemogokan-pemogokan yang berlangsung pada periode ini sering dianggap oleh sejumlah peneliti kurang memberikan efek yang signifikan pada perubahan kondisi perburuhan(Manning, 1993, 64-65). Ada sejumlah hal yang patut dicatat dalam hal ini. Pertama, dari sisi upah, kenaikan upah baik di sektor perkebunan maupun manufaktur tidak terlalu signifikan karena tingkat inflasi sendiri melambung jauh lebih cepat. Kedua, meskipun frekuensi mogok sedemikian tinggi, ukuran besaran keterlibatan buruh di dalam pemogokan-pemogokan yang terjadi di era ini masih tidak terlalu besar dibanding dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan dan perbandingan internasional pada umumnya. Rendahnya angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur (6%) menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan alasan kecilnya tingkat keterlibatan buruh dalam gerakan pemogokan. Konsekuensinya efek sosial politik yang menekan dari gerakan ini bagi perbaikan kondisi kehidupan buruh juga tidak memberikan dampak yang cukup berarti. Ketiga, dampak yang relatif menyolok dari pemogokan yang dilakukan oleh serikat hanya dijumpai pada industri-industri besar yang dimiliki oleh modal asing khususnya pada isu-isu pelanggaran jam kerja dan penggunaan tenaga kerja anak (Manning, 1993; 64). Keempat, banyak kasus perselisihan yang berhasil diselesaikan melalui lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan industrial sehingga pemogokan tidak lagi menjadi sarana pokok untuk menekan perusahaan (Manning, 1993. 64). Kelima, politik negara yang masuk ke dalam gerakan perburuhan menambah fragmentasi dari gerakan serikat buruh yang diantaranya telah terbagi-bagi melalui warisan historis pada masa kolonial.

Periode Suharto

Pola aksi industrial pada periode ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian penting. Bagian pertama adalah periode restrukturisasi sistem hubungan industrial dengan kontrol politik yang sangat ketat terhadap gerakan perburuhan. Periode Bagian kedua adalah periode dinamika tarik-menarik antara negara, modal dan gerakan perlawanan buruh yang mulai menguat yang bersinergi dengan gerakan-gerakan sosial politik lainnya.

Bagian pertama berlangsung antara awal 1970an hingga awal 1990an. Pada periode ini suasana hubungan industrial jauh dari hiruk-pikuk gejolak industrial. Kemunculan situasi



ini disebabkan oleh perubahan sistem politik negara yang berusaha keras mengendalikan politik perburuhan demi restrukturisasi ekonomi politik negara. Gejolak teredam setelah serikat buruh direstrukturisasi oleh negara dengan konsep dan ideologi unitaris hingga menjadi satu organisasi yang terkontrol secara politik. Peningkatan suhu konflik industrial sedikit terjadi pada separuh pertama dekade 1980an (lihat lampiran grafik tentang frekuensi pemogokan dan jumlah buruh yang terlibat) namun dengan cepat negara melakukan kontrol yang ekstra ketat dengan dilibatkannya militer secara langsung dalam seluruh institusi hubungan industrial & penanganan langsung perselisihan perburuhan. Akibatnya sepanjang periode 70an hingga awal 1990an pemerintah berhasil membangun suasana ketenangan industrial melalui represi yang ketat. Kondisi ini dipandang penting bagi pemerintahan Suharto untuk mengawal model pembangunan kapitalisme industrial yang dapat memberi dorongan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Pada bagian kedua dari periode ini, gejolak industrial meledak kembali seakan mengisi kembali suasana hingar-bingarnya konflik industrial yang pernah berlangsung pada periode-periode sebelumnya. Statistik pemogokan memperlihatkan bahwa sepanjang akhir era kekuasaan Suharto pada periode 1990an, gelombang pemogokan mengalami lonjakan-lonjakan yang tinggi. Berawal dari dicabutnya kebijakan larangan mogok yang disertai dengan kebijakan mengenai sistem kenaikan upah secara berkala, gelombang protes buruh melanda sejumlah sektor industri dan wilayah-wilayah konsentrasi industri baik di Jawa maupun Sumatera (lihat Kamen, 1997). Isu yang diangkat kebanyakan menyangkut isu upah⁷. Meskipun begitu tetap ada sejumlah isu menonjol lain seperti PHK, kondisi kerja, kesepakatan kerja bersama dan kebebasan berserikat (Yapusham, 1996). Sementara itu pola pemogokan relatif beragam mulai dari pemogokan biasa, demonstrasi, hingga tindakan kekerasan. Namun isu *wild-cat strikes* sangat sering muncul mengingat proses legalisasi tindakan kolektif ini masih tetap sangat sulit diperoleh. Di samping itu pemogokan yang dilakukan tidak selalu didukung oleh serikat pekerja yang umumnya tidak representatif terhadap kepentingan pekerja. Organisasi pemogokan lebih banyak dibangun dengan basis jaringan informal yang terbentuk melalui ketidakpuasan struktural di dalam pabrik yang tidak jarang di tingkat eksternal difasilitasi oleh ornop-ornop (Warouw, 2000; Ganie-Rochman, 2002).

Ada sejumlah hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain yang dapat menjelaskan kondisi-kondisi struktural yang memungkinkan aksi protes buruh secara kolektif mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Pertama, pemerintah telah menarik hambatan legal terhadap peluang untuk melakukan pemogokan pada tahun 1990 dengan dicabutnya peraturan tentang larangan mogok. Kedua, kontrol sosial politik yang dilakukan oleh komunitas organisasional lokal maupun internasional terhadap orientasi negara dalam praktek hubungan industrial yang cenderung represif terhadap aktivisme

⁷ Kamen menemukan bahwa sebelum 1980an pemogokan cenderung terjadi di industri-industri berat seperti metal dan otomotif (Kamen, 1997). Profil seperti ini menyerupai situasi gejolak industrial pada masa orde lama (Manning, 1993). Namun sejak 1990an, sebaran pemogokan cenderung beralih ke industri-industri manufaktur ringan, padat karya, berorientasi ekspor dan berupah rendah seperti tekstil, garmen, kulit dan sepatu, rokok, tembakau dan makanan (Kamen, 1997).



perburuhan⁸. Ketiga, gerakan buruh mulai terbangun kembali melalui kekuatan yang berasal dari kelompok-kelompok buruh sendiri maupun dukungan dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang berusaha membangun kesadaran kolektif buruh tentang posisi sosial mereka (Chalid, 1997; Hadiz, 1997). Keempat, gerakan buruh ini bersinergi dengan gerakan-gerakan sosial politik lain yang juga melakukan perlawanan terhadap dominasi negara yang terlalu besar dan mengancam hak-hak sipil seperti gerakan-gerakan komunitas atau ornop dalam bidang agraria, agama, orientasi politik, hak-hak ekonomi komunitas, gender, dan lain-lain (Ganie-Rochman, 2002; lihat juga Hyman, 1979)⁹.

Gelombang protes kolektif buruh ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembentukan kesadaran di kalangan buruh sendiri maupun di tingkat masyarakat pada umumnya tentang kondisi obyektif buruh. Peristiwa-peristiwa dan pengalaman buruh dalam pemogokan yang disebarluaskan melalui media massa maupun jaringan gerakan perburuhan menjadi dasar penting bagi pembentukan kesadaran kolektif buruh¹⁰ (Hadiz, 1997; Warouw, 2000). Sementara itu di tingkat masyarakat meluasnya diskusi-diskusi publik maupun kelompok berkenaan dengan isu perburuhan ini merefleksikan terbentuknya wacana yang lebih terbuka terhadap persoalan serius perburuhan yang selama ini berusaha dimanipulasi oleh negara melalui citra dan ideologi unitaris dalam hubungan industrial. Kendatipun tidak seluruh populasi buruh memperoleh pencerahan semacam ini, namun hal ini melahirkan aktor-aktor penting baik yang berasal dari kalangan buruh sendiri maupun organisasi dan komunitas lain di dalam masyarakat yang berperan di dalam melakukan kontrol terhadap modal dan negara di dalam praktek hubungan industrial.

Pemogokan yang meluas juga turut menyumbang pada pembentukan kesadaran di kalangan pengusaha maupun pemerintah pusat maupun daerah tentang adanya respon kolektif yang sangat serius dari gerakan buruh terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak buruh. Walaupun demikian hal ini tidak menjamin bahwa pengusaha akan cenderung melakukan tindakan preventif atau pembenahan sistem hubungan industrialnya. Kebanyakan pengusaha cenderung bersikap reaktif ketika isu ini melanda perusahaannya (Nugroho, 2002).

Jika aksi-aksi industrial yang terjadi membantu terbangunnya kesadaran kolektif tentang situasi obyektif buruh, maka dampaknya terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi buruh tidak terlampaui menonjol. Di tingkat perusahaan yang mengalami peristiwa pemogokan, aksi-aksi industrial memberikan efek yang beragam (Nugroho, 2002). Tidak sedikit kasus perselisihan yang diikuti oleh peristiwa pemogokan atau demonstrasi

⁸ Serikat buruh internasional, badan-badan internasional, media massa, komunitas akademik, dan organisasi non-pemerintah lokal maupun internasional memberikan tekanan kuat kepada pemerintahan Suharto melalui publikasi dan kampanye untuk lebih memperhatikan hak-hak buruh. Sementara itu Amerika Serikat juga memberikan tekanan ekonomi agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak buruh.

⁹ Di negara sedang berkembang pemogokan-pemogokan sering memiliki keterkaitan yang erat dengan bentuk-bentuk protes masyarakat lainnya (Hyman, 1979).

¹⁰ Kesadaran kolektif buruh sebagai sebuah kelas pekerja umumnya dapat dibangun dengan baik di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi industri yang berada di daerah perkotaan atau semi-perkotaan. Konsentrasi pemukiman buruh di daerah ini dan isu-isu proletarianisasi dalam kehidupan kota lebih mudah membangkitkan kesadaran tersebut (Hadiz, 2001)



terbukti memberikan hasil yang cukup menguntungkan buruh. Namun cukup banyak peristiwa pemogokan diakhiri dengan kegagalan buruh di dalam memperoleh tuntutannya¹¹. Kegagalan ini dapat berbentuk tidak diterimanya tuntutan buruh oleh pengusaha, diterima tuntutannya tapi diikuti dengan konsekuensi PHK bagi aktivisnya, perlakuan diskriminatif, pengurangan komponen imbalan, atau bahkan mengalami perlakuan kekerasan baik dari perusahaan ataupun aparat keamanan negara (Nugroho, 2002). Perbaikan upah secara mikro (di tingkat perusahaan) yang disebabkan oleh pemogokan memang terjadi pada sejumlah perusahaan. Sementara di tingkat makro, beberapa daerah yang memiliki tingkat kecenderungan pemogokan yang tinggi juga menunjukkan adanya kenaikan upah minimum berkala yang relatif kontinyu dan perbaikan di dalam kebijakan mengenai struktur upah minimum (Rudiono, 1992). Namun secara riil, perbaikan upah senantiasa berkompetisi dengan tingkat inflasi. Konsekuensinya, kenaikan upah tidak disertai dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang signifikan bagi buruh. Jika memperhatikan pola aksi pemogokan, kebanyakan pemogokan diarahkan untuk memaksa pengusaha mematuhi peraturan, perundang-undangan atau kebijakan perburuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan buruh pada akhirnya berfungsi sebagai substitusi dari fungsi legal yang secara normatif seharusnya dijalankan oleh negara. Ini memperlihatkan disfungsi peran negara sebagai kontrol terhadap sistem hubungan industrial.

Keterbatasan efek dari aksi-aksi industrial yang berkembang tersebut terkait dengan sejumlah faktor. Pertama, perubahan orientasi pembangunan ekonomi negara yang mengarah orientasi ekspor menyebabkan terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi internasional.

Periode Kebebasan Berserikat

Kecenderungan fluktuasi gejolak industrial yang diukur melalui angka pemogokan pada periode 1999 hingga saat ini tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan situasi 1990an (lihat lampiran). Namun ada beberapa pola aksi perburuhan yang agak berbeda dengan periode-periode sebelumnya dan umumnya tidak tercatat dalam angka pemogokan. Aksi-aksi berupa demonstrasi tanpa diikuti dengan pemogokan atau terkait langsung dengan perusahaan tertentu semakin lebih sering dilakukan. Sasaran aksi umumnya adalah kantor-kantor Depnaker baik di tingkat pusat maupun daerah, DPR atau DPRD, atau ruang-ruang publik terbuka. Isu yang diangkat juga melebar tidak semata-mata soal upah tetapi merambah pada isu-isu buruh kontrak dan outsourcing. Sementara itu pola orientasi lokalitasnya juga berubah. Pemogokan dan demonstrasi yang dilakukan semakin terkait dengan situasi lokal. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya kebijakan desentralisasi politik di dalam sistem pemerintahan dan politik pada umumnya.

¹¹ Sulit untuk membuat perbandingan statistik terhadap kasus yang berhasil dan tidak berhasil memenangkan tuntutan buruh. Pertama data tentang kasus ini tidak tersedia dengan memadai. Kedua, secara metodologis, konsep keberhasilan menjadi sangat rumit untuk didefinisikan.



Namun demikian tidak bergesernya pola statistik pemogokan antara periode sebelum dengan sesudah ditetapkannya kebijakan kebebasan berserikat menimbulkan pertanyaan penting mengenai gerakan buruh dan perubahan sistem hubungan industrial itu sendiri. Tidak adanya pergeseran fluktuasi yang signifikan tersebut tidak bisa secara mudah mengindikasikan segera membaiknya hubungan antara perusahaan dengan buruh jika dibanding dengan situasi pada masa sebelumnya. Tentu saja, pasca kebijakan kebebasan berserikat, unionisasi mengalami pertumbuhan luar biasa. KKB/PKB diterima dengan cukup luas sebagai bagian dari kebutuhan perusahaan. Namun demikian ini tidak terjadi pada semua perusahaan. Sementara itu penerimaan KKB/PKB dan tumbuhnya serikat-serikat pekerja tidak berarti bahwa konflik industrial akan berkurang. Kemungkinan sebaliknya sangat besar terjadi. Bukankah tingkat pemogokan yang tinggi di negara-negara maju sesungguhnya merupakan konsekuensi dari efektifnya fungsi serikat buruh. Namun situasi ini tidak terjadi di dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia.

Ada sejumlah realitas obyektif yang patut diperhitungkan dalam mencermati situasi ini. Unionisasi yang tinggi tidak sertamerta menggambarkan kekuatan buruh yang meningkat. Tidak adanya korelasi positif yang kuat antara peningkatan jumlah serikat buruh dengan peningkatan jumlah anggota serikat (*union density*) pada dasarnya menggambarkan tingkat fragmentasi yang tinggi. Realitas ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional maupun lokal tetapi juga di dalam setting tempat kerja. Bangunan solidaritas dan kolektivitas gerakan buruh menjadi rawan dengan realitas ini. Setiap perselisihan perburuhan atau ketidapuasan terhadap praktek dan kebijakan hubungan industrial menjadi cenderung disikapi secara segmental oleh masing-masing organisasi.

Di sisi lain, serikat buruh tidak hanya kehilangan anggota akibat fragmentasi dalam gerakan buruh tetapi juga adanya tekanan struktural dalam kebijakan perburuhan baik yang ditetapkan di tingkat negara maupun di tingkat perusahaan. Fenomena penggunaan tenaga kerja kontrak dan *outsourcing* menjadi suatu isu yang sangat marak belakangan ini sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada fleksibilitas. Hal ini membawa kesulitan bagi serikat di dalam menjaga stabilitas kekuatan kolektifnya.

Menilai kembali aksi industrial dan kekuatan serikat buruh sekarang dan ke depan

Aksi industrial melibatkan begitu banyak konsep yang cukup rumit untuk dipetakan. Aksi industrial secara teoritis menunjukkan adanya tindakan menekan yang nyata yang dilakukan baik oleh buruh ataupun oleh pengusaha terhadap salah satu diantara ke dua pihak ini di dalam suatu perselisihan industrial yang menyangkut hubungan produksi (Salamon, 1992)¹². Aksi industrial yang dilakukan oleh buruh pada dasarnya merupakan

¹² Tekanan yang dilakukan oleh buruh maupun pengusaha menggunakan sumber2 kekuatan strategis yang khas dari masing-masing pihak. Kekuatan strategis buruh adalah kolektivitas. Sedangkan kekuatan pengusaha adalah modal. Namun definisi ini mempunyai persoalan metodologis. Kebanyakan definisi yang dibuat tidak menyertakan faktor efek dari tindakan menekan tersebut terhadap proses produksi. Konsekuensinya tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh buruh tanpa mengurangi jam kerja juga dapat dimasukkan dalam kategori aksi industrial. Ini akan memasukkan juga demonstrasi kolektif buruh terhadap pemerintah yang berkenaan baik langsung maupun tidak langsung dengan kasus perselisihan industrial tanpa harus mengakibatkan dampak langsung terhadap proses produksi. Definisi seperti ini menjadi lebih longgar dibanding definisi seperti pemogokan, sabotase, dll.



suatu bentuk protes kolektif terhadap ketidaksesuaian atas kesepakatan yang telah dibuat antara pekerja dengan perusahaan atau terhadap suatu kondisi yang mengancam hilangnya hak-hak buruh sebagai pekerja atau bahkan sebagai manusia.

Aksi industrial buruh merupakan salah satu bentuk kekuatan strategis buruh manakala konflik yang inheren dalam hubungan produksi muncul ke permukaan dalam bentuk perselisihan industrial. Aksi industrial berbeda dengan strategi buruh lainnya yang berbentuk negosiasi, perundingan, atau partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan yang cenderung lebih banyak menggunakan akomodasi. Kemunculan tindakan kolektif ini menegaskan adanya konflik yang riil di antara buruh dan modal. Namun kemunculan aksi kolektif ini memerlukan sejumlah pra-kondisi dan pra-syarat.

Aksi-aksi seperti pemogokan pada dasarnya merupakan sebuah tindakan kolektif yang dilakukan untuk memobilisasi dan mengorganisasikan sumber daya (Fransozi, 1995) Aksi protes kolektif, sebagaimana dikatakan oleh Tilly dibangun di atas konsep kepentingan, organisasi, mobilisasi dan struktur peluang (Kelly, 1998). Dengan mendefinisikan perasaan ketidakadilan kolektif yang diartikulasikan oleh pelanggaran terhadap kesepakatan kerja atau keyakinan tentang hak, serta diperkuat oleh adanya penurunan kondisi kehidupan material pekerja, maka ketidakpuasan dalam hubungan produksi mudah untuk dikonversikan menjadi kepentingan kolektif. Kondisi semacam ini yang sesungguhnya menjadi basis penting dari munculnya kolektivisme dalam gerakan buruh (Kelly, 1998). Melalui organisasi dan mobilisasi kepentingan maka ketidakpuasan ini akan berubah menjadi tindakan kolektif. Oleh karena itu peran dari organisasi buruh yang dibangun oleh buruh sendiri – dalam hal ini serikat buruh – menjadi sangat fungsional. Namun demikian perubahan ke arah tindakan kolektif ini mensyaratkan pula pentingnya karakteristik struktur peluang. Struktur peluang pada dasarnya adalah konstelasi hubungan ekonomi politik antara kelompok pekerja dengan kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat yang memungkinkan pekerja untuk mendefinisikan dan memobilisasi kepentingannya (Kelly, 1998; Fransozi, 1995).

Protes Buruh dan Peran Negara

Adalah sebuah kecenderungan umum di negara sedang berkembang bahwa negara seringkali mengambil peran yang sentral dan dominan dalam mengarahkan dan mengorganisasikan pembangunan (Martinussen, 1999). Dalam sistem hubungan industrial, negara turut berpartisipasi dalam membentuk struktur dasar dari pola hubungan produksi serta karakteristik unionismenya. Struktur yang demikian dibangun untuk memberi keleluasaan bagi modal di dalam memaksimalisasikan keuntungan dimana negara dapat turut menyerap surplus tersebut.

Peran negara yang dominan ini membuat serikat buruh maupun gerakan buruh secara luas harus senantiasa berhadapan dengan negara (Jelin, 1977 & Waterman, 1976). Hal seperti ini tampak dengan jelas sejak republik ini berdiri –demikian juga pada periode



kolonialisme – negara mengambil peran yang aktif dan dominan di dalam mengendalikan bentuk-bentuk aksi perburuhan. Bahkan ketika peran pemerintah pusat secara perlahan ditarik perannya dari ruang pasar sebagaimana tercermin dalam sistem ekonomi politik di Indonesia belakangan ini, pada hakekatnya peran negara masih tetap dominan karena yang terjadi adalah pengalihan sebagian fungsinya kepada pemerintah daerah.

Aksi protes buruh pada akhirnya bukan merupakan sebuah hubungan konflik antara buruh dengan modal melainkan juga memperhitungkan kehadiran negara. Hal ini terlihat dengan sangat eksplisit selama masa periode 1960an hingga akhir 1990an. Negara hadir bukan sebagai mediator atau pelindung bagi kepentingan buruh. Jika di dalam sistem ekonomi politik sebelum era kebebasan berserikat, negara melakukan represi langsung secara politik terhadap gerakan protes perburuhan, maka di dalam sistem ekonomi pasar yang semakin kokoh seperti sekarang ini negara mengambil struktur kontrol yang berbeda. Di dalam sistem ekonomi pasar, negara memiliki seperangkat logika ekonomi yang diatur melalui kebijakan-kebijakan yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan peluang aksi kolektif tersebut yang berdampak pada melemahnya peluang dan struktur aksi tersebut.

Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang berkembang saat ini disusun dengan semangat untuk membangun sistem pasar kerja dan hubungan industrial yang fleksibel. Bangunan kebijakan seperti ini memungkinkan modal untuk fleksibel dalam ukuran jumlah tenaga kerja dan waktu kerja (*numerical flexibility*) (Blyton & Turnbull, 1998). Hal ini memberikan dampak yang meluas pada penggunaan buruh kontrak dan *outsourcing*. Rasio penggunaan kategori buruh seperti ini bervariasi diantara tiap jenis industri namun hal ini memberi dampak pada tingkat kepadatan union (*Union density*). Serikat buruh mengalami kesulitan untuk membangun sebuah kekuatan kolektif yang stabil dan besar.

Protes Buruh dan Dinamika Sistem Produksi

Konsep fleksibilitas tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan negara, konsep ini menjadi lebih kasat mata ketika ditilik di tingkat sistem produksi itu sendiri karena memang dari wilayah inilah logika fleksibilitas diadopsi. Fleksibilitas fungsional, fleksibilitas jumlah, waktu, produksi, dan sistem imbalan menjadi konsep yang penggunaannya sangat meluas di dalam sistem produksi dewasa ini (Blyton & Turnbull, 1998). Kompetisi pasar yang sedemikian ketat di tingkat global dan struktur mata rantai produksi yang sangat kompleks namun fleksibel menuntut pola produksi dan hubungan produksi yang juga fleksibel (Moody, 1997). Dengan sistem semacam ini, modal menjadi sangat dinamis di dalam cara produksinya bahkan di dalam gerak investasinya. Modal dengan fleksibel dapat dipindahkan atau diperpanjang atau diperpendek rantai produksinya manakala ancaman terhadap kesinambungan produksi dan keuntungan muncul.

Dengan sistem produksi yang semacam itu, buruh semakin menjadi kehilangan kekuatannya. Kekuatan kolektif buruh menjadi semakin mudah untuk dikendalikan dalam jumlahnya oleh modal serta semakin mudah untuk dibagi-bagi ke dalam segmen-segmen



produksi sesuai dengan dinamika pasar produksi. Jika kolektivitas buruh terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil melalui struktur produksi tersebut, maka disain hubungan produksi membagi lagi lebih jauh kolektivitas buruh tersebut menjadi lebih individual lagi. Pada perusahaan-perusahaan yang padat tenaga kerja sejauh ini masih cukup banyak mengandalkan disain kerja model fordisme, namun tidak demikian halnya dengan perusahaan-perusahaan yang padat modal. Orientasi ke arah hubungan yang lebih individual di antara manajemen dan buruh dengan meminimalkan fungsi serikat buruh di dalam hubungan produksi menjadi salah satu model hubungan produksi yang belakangan ini semakin banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Adanya lembaga bipartit di dalam perusahaan menjadi salah satu institusi yang memungkinkan fungsi tersebut. Hal ini tentunya akan menggeser sejumlah fungsi yang semula dibangun oleh serikat buruh kecuali jika serikat dilibatkan secara formal ke dalam institusi tersebut. Di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan industrial, perusahaan akan lebih banyak memanfaatkan mekanisme-mekanisme yang demikian itu.

Konsekuensi riil dari bentuk hubungan produksi seperti ini terhadap bangunan kolektivisme gerakan buruh cukuplah signifikan. Individualisme dan fragmentasi kolektivisme buruh sebagai akibat sistem produksi menjadi sumber degradasi kekuatan serikat dan gerakan buruh. Struktur solidaritas yang harus dibangun oleh buruh menjadi lebih rumit. Menggalang kekuatan kolektif yang efektif untuk melakukan protes terhadap perusahaan tidak menjadi perkara yang ringan. Frekuensi mogok dan demonstrasi hingga belakangan ini masih menunjukkan fluktuasinya walaupun ada kecenderungan sedikit menurun. Namun tingkat partisipasi pekerja ada kecenderungan terlihat menurun (lihat lampiran grafik). Walaupun ini masih harus diuji secara statistik namun setidaknya secara hipotetis hal ini menggambarkan adanya kemungkinan kaitan antara tingkat partisipasi buruh dalam mogok dengan masalah yang dihadapi serikat di dalam mempertahankan dan membangun kolektivisme.

Protes Buruh dan Gerakan Buruh

Sementara itu degradasi kolektivisme yang datang dari faktor-faktor eksternal berlangsung semakin intensif, dari dalam sendiri buruh juga menghadapi fragmentasi yang luar biasa. Kebijakan kebebasan berserikat di satu memberi peluang positif bagi demokrasi dalam hubungan perburuhan namun di sisi lain menimbulkan dampak perpecahan. Keadaan ini sesungguhnya hanya merupakan salah satu faktor dari serangkaian faktor lain yang secara struktural dan historis telah melekat di dalam perjalanan sejarah gerakan buruh.

Pertama, fragmentasi sesungguhnya telah terjadi sejak periode awal dari gerakan buruh berkembang di negara ini. Peran negara yang sangat besar di dalam mengontrol gerak dan struktur unionisme pada awal kekuasaan Suharto turut menyumbang kepada fragmentasi yang ada pada saat ini. Ketidakpuasan ideologis, program, maupun strategi seringkali menjadi sumber fragmentasi yang kerap terjadi. Kedua, basis primordialisme – kendatipun mungkin tidak terlalu signifikan – yang berasal dari warisan sejarah gerakan buruh pada masa lampau turut memperkaya fragmentasi karena faktor ideologi menjadi



penting. Hal ini sedikitnya mempersulit pembentukan jaringan solidaritas yang efektif di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam gerakan buruh pada umumnya bahkan di dalam kelompok dengan basis primordial itu sendiri. Ketiga, lemahnya organisasi internal di dalam serikat hampir menjadi ciri dari hampir sebagian besar gerakan serikat buruh nasional. Keempat, munculnya kondisi lebih dari satu serikat di dalam perusahaan menimbulkan kompetisi di dalam gerakan buruh. Kendatipun ini bukan wajah umum dari keadaan perusahaan yang ada di Indonesia, namun kecenderungan ini turut mempersulit pengembangan kolektivisme. Konsekuensinya, pendefinisian isu permasalahan dalam hubungan industrial di antara pekerja tidak jarang mengalami kendala karena ketidaksamaan kepentingan di antara buruh sendiri. Kelima, sistem politik yang terdesentralisasi saat ini melalui kebijakan otonomi daerah membuat buruh terfokus dengan isu yang lekat dengan lokalitas. Di tingkat lokal ini mungkin akan memberi dampak yang positif karena fokus gerakan menjadi lebih spesifik. Namun hal ini masih mengundang pertanyaan mengenai apa dampaknya pada gerakan di tingkat nasional, sementara sejumlah kebijakan perburuhan dan industri juga dirumuskan di tingkat nasional.

Protes Buruh dan Gerakan Sosial dalam Masyarakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Hyman, gerakan protes buruh di negara berkembang seringkali terkait dengan gerakan-gerakan sosial lainnya di dalam masyarakat (Hyman, 1979). Namun dalam kenyataan kini di Indonesia, gerakan semacam itu tidak dapat dibangun dengan sederhana. Apabila pada masa orde baru, jaringan semacam itu lebih mudah untuk dibangun, maka saat ini struktur gerakan tersebut menjadi tidak sederhana lagi. Bentuk dan dinamika proses demokratisasi yang berlangsung saat ini justru memberi ruang kepada masing-masing kelompok dan organisasi untuk saling berkompetisi memperebutkan sumber-sumber daya sosial ekonomi maupun politik. Cukup kerap ditemui bahwa buruh harus berhadapan dengan elemen-elemen di dalam komunitas dan masyarakat sendiri pada waktu harus berurusan dengan modal atau bahkan negara. Di satu sisi elemen komunitas atau gerakan sosial lain dapat terkooptasi ke dalam kepentingan modal atau negara, di sisi lain buruh sendiri juga dapat mengalami hal yang sama.

Penutup

Aksi-aksi industrial yang bersifat kolektif yang pernah marak pada awal hingga pertengahan tahun 1900an di berbagai negara – khususnya negara industri maju – saat ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Aksi semacam ini sebelumnya dipandang sebagai salah satu bentuk tekanan yang cukup efektif dari serikat buruh untuk memperoleh keseimbangan distribusi surplus ekonomi dan sejumlah hak perburuhan. Namun kali ini di samping tekanan struktural dari sistem ekonomi politik global, pola hubungan produksipun berubah. Model-model pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga menjadi beragam. Walaupun demikian, hingga saat ini masih terdapat perdebatan yang sangat serius mengenai seberapa besar dampak pada perubahan



model hubungan produksi ini pada kekuatan tawar-menawar riil dari buruh di dalam hubungan produksi.

Di Indonesia, situasinya sedikit banyak memiliki beberapa perbedaan. Akibat dari represi sistem politik yang cukup panjang, maka gerakan buruh yang menjadi basis dari aksi-aksi industrial tersebut baru muncul di tahun 1990an. Aksi industrial yang pernah marak pada masa awal kemerdekaan baru muncul kembali dalam kurang dari dua dekade ini. Meskipun demikian, bentuk-bentuk protes semacam itu saat ini juga sudah menghadapi sejumlah permasalahan. Terintegrasinya sistem perekonomian nasional bahkan lokal ke tingkat global mendesak negara untuk lebih akomodatif terhadap dinamika pasar dan modal di tingkat tersebut. Dengan adanya kebutuhan negara untuk mempertahankan kinerja pembangunan ekonomi serta mendorong pertumbuhannya, negara mempunyai kepentingan untuk menciptakan suasana kondusif. Sejak kebijakan industrialisasi dicanangkan hingga saat ini, negara melakukan berbagai macam bentuk kontrol terhadap peluang-peluang terjadi gejolak industrial. Yang menjadi masalah adalah bahwa pemogokan dan bentuk-bentuk protes perburuhan terhadap ketimpangan pembagian surplus kerap dipandang sebagai masalah ketimbang sebagai suatu bentuk respon yang logis dari situasi hubungan produksi. Sementara itu kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin fleksibilitas kinerja modal dan produksi juga mengancam kolektivisme yang menjadi basis penting bagi buruh dalam melakukan bargaining baik itu dilakukan dalam kerangka perundingan kolektif (collective bargaining) maupun dalam aksi-aksi protes kolektif buruh. Sementara itu gerakan buruh itu sendiri memiliki sejumlah kelemahan internal dalam kapasitas organisasi dan terancam oleh fragmentasi internalnya. Sementara itu buruh juga terfragmentasi oleh struktur pasar dan sistem produksi yang dikembangkan oleh modal.

Hingga saat ini aksi pemogokan dan demonstrasi masih menjadi salah satu alat bargaining yang penting – kendatipun pemogokan selalu merupakan pilihan terakhir. Namun demikian efektivitasnya semakin hari semakin terancam oleh struktur ekonomi politik yang ada. Oleh karenanya sebagian serikat buruh mulai memandang penting mekanisme-mekanisme lain yang memperkuat efektivitas dari perundingan. Dialog, kampanye, menjalin jaringan dalam gerakan sosial yang lebih luas dengan aktor-aktor yang berkepentingan dengan sistem produksi menjadi pilihan tak terelakkan. Namun demikian, hal ini tidak menjamin kolektivisme dalam bentuk yang tradisional akan dapat dipertahankan. Agenda gerakan kemasaya yang akan datang perlu mendorong serikat buruh dan aktor-aktor lain yang berkepentingan dengan gerakan buruh mendefinisikan kembali konsep kolektivisme yang mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi politik yang ada.



Bibliografi

- Barrett, B et al. (eds) (1977) *Industrial Relations and the Wider Society: Aspects of Interaction*. London: Collier MacMillan.
- Blyton, Paul and Turnbull Peter (1998) *The Dynamics of Employee Relations*. London: Macmillan Press Ltd.
- Fransozi, Roberto (1995) *The puzzle of strikes : class and state strategies in postwar Italy*. Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
- Kelly, John (1998) *Rethinking Industrial Relations : Mobilization, Collectivism and Long Waves*. London: Routledge.
- Hadiz, Vedi R (1997) *Workers and the State in New Order Indonesia*. London: Routledge.
- _____ (2001) “New Organising Vehicles in Indonesia: Origins and Prospects” in Hutchison & Brown (eds). *Organising Labour in Globalising Asia*. London: Routledge.
- Hyman, Richard (1974) *Strikes*. London: Fontana.
- _____ (1979) “Third World Strikes in International Perspective” in *Development and Change*, vol 10. pp.321-37. London: SAGE.
- Jelin, Elizabeth (1977) “‘Comments on Third World Strikes’ by Peter Waterman” in *Development and Change*. No.8. (1977) pp.256-257.
- Manning, Chris (1993) “ Structural Change and Industrial Relations during the Suharto Period: An Approaching Crisis?” in *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol.29. No.2 August 1993
- _____ (1998) *Indonesian Labour in Transition, An East Asian Success Story?*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martinussen, John (1999) *Society, State and Market. A Guide to Competing Theories of Development*. London: Zed Books.
- Moody, Kim (1997) *Workers in A Lean World*. London: Verso.
- Ganie-Rochman, Meuthia (2002) “An Uphill Struggle: Advocacy NGOs under Soeharto’s New Order” *Doctoral Disertation* at the Catholic University of Nijmegen.



Rudiono, Danu (1992) “Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak”. *Prisma*. No.1. 1992

Salamon, Michael (1992) *Industrial Relations, Theory & Practice*: New York: Prentice Hall.

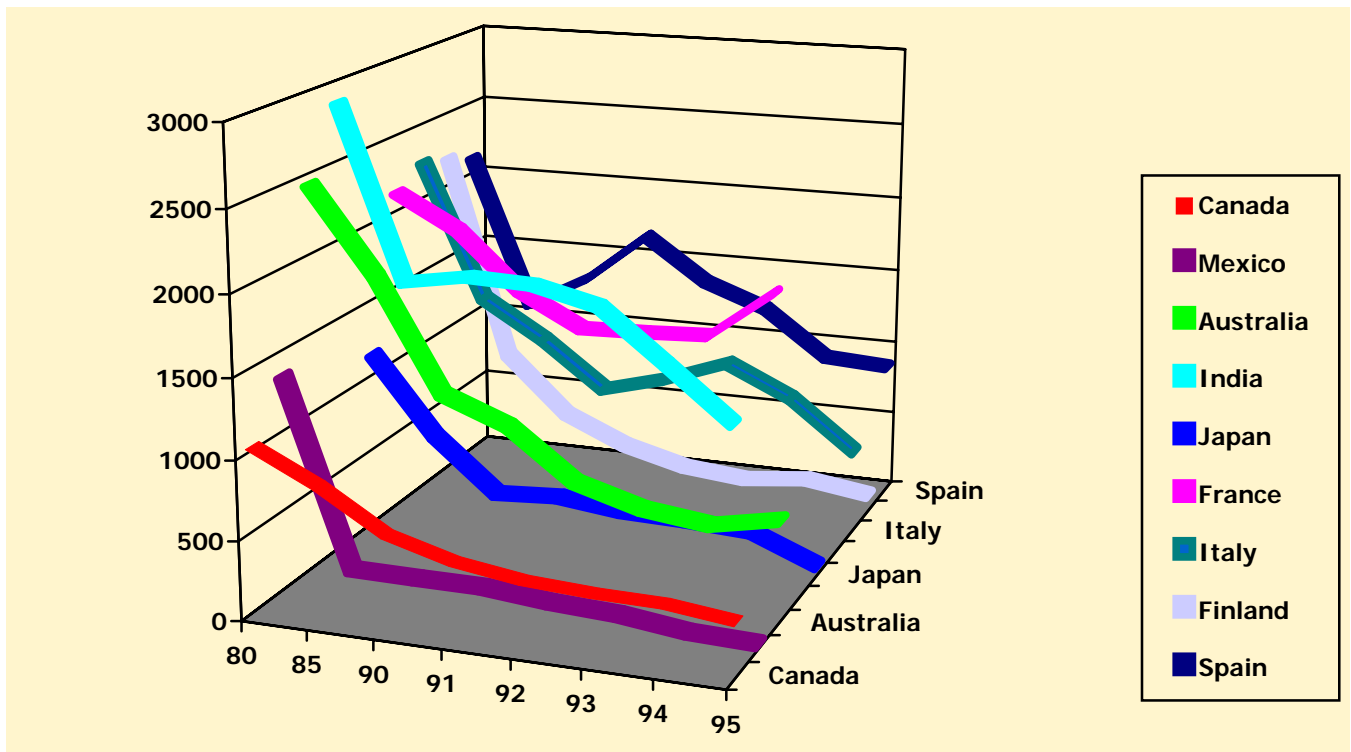
Warouw, Nicholas (2000) *Pemogokan Buruh: Perjuangan Kaum Buruh pada Masa Orde Baru*. Yogyakarta: KesAnt.

Waterman, Peter (1976) “Third World Strikes: An Invitation to Discussion” in *Development and Change*. no.7 (1976). pp.331-344.



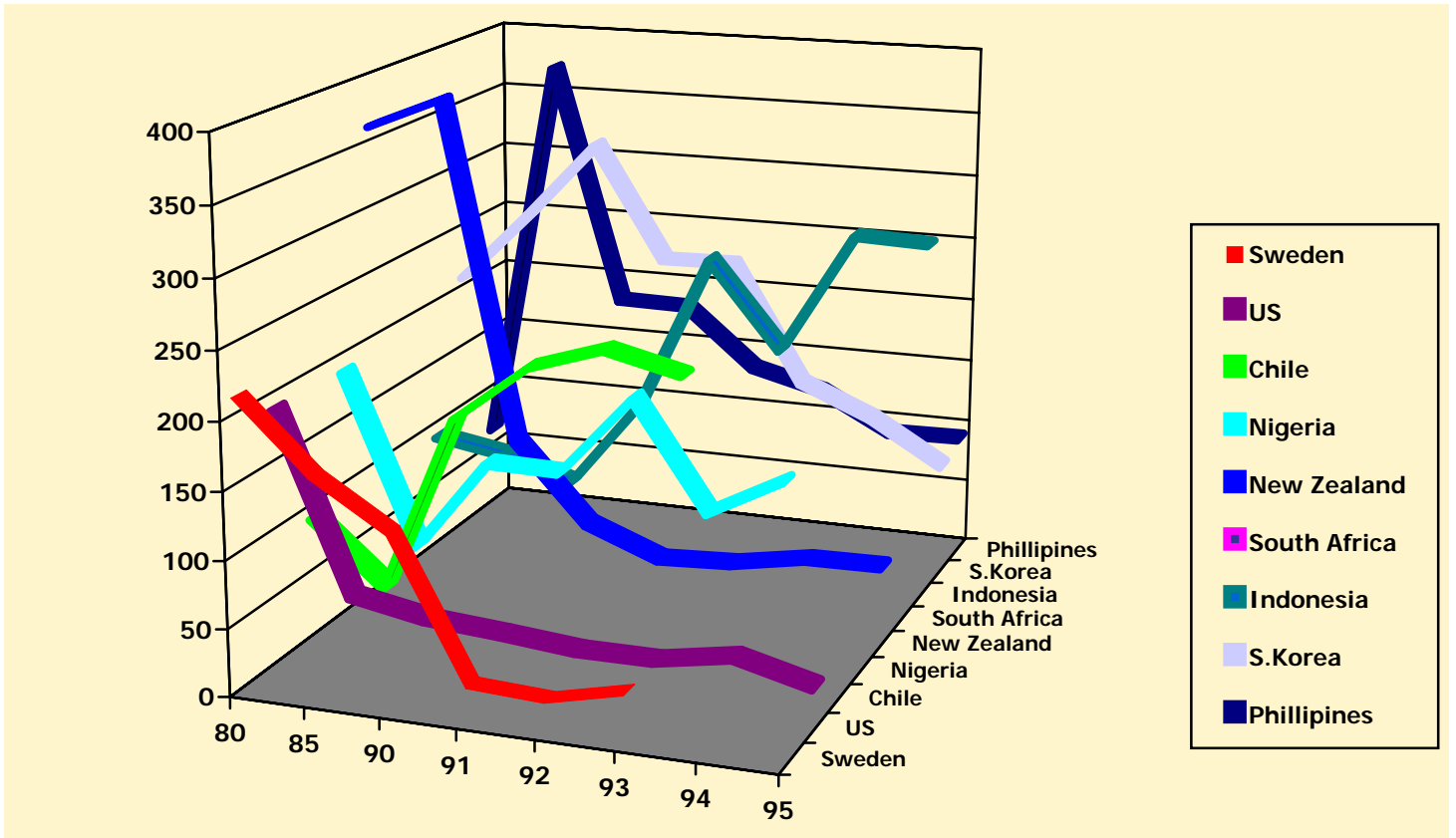
Lampiran 1

Perbandingan Tingkat Pemogokan
antar Negara 1980-1995
(kelompok rata-rata tingkat pemogokan tinggi)
(Grafik oleh Hari Nugroho. Sumber : World Labor Report, ILO; 1997-1998)



Lampiran 2

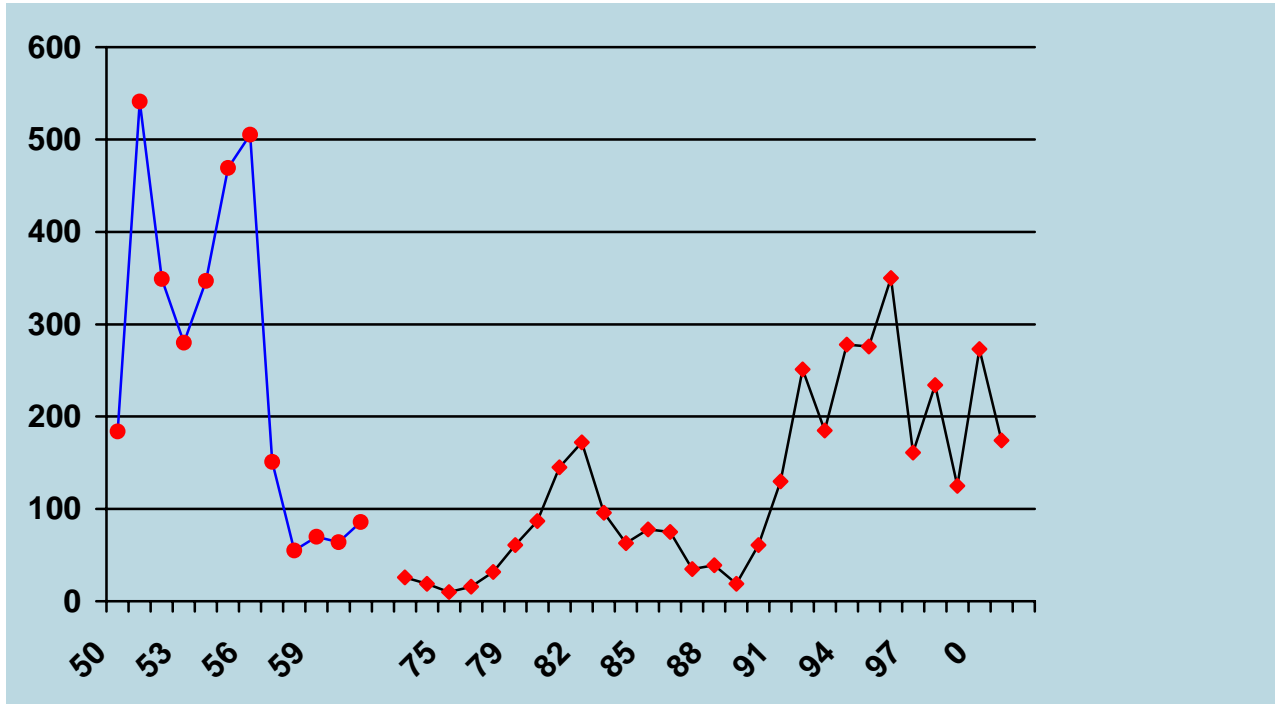
Perbandingan Tingkat Pemogokan
 antar Negara 1980-1995
 (dgn tk.pemogokan < 500/thn)
 (Grafik oleh Hari Nugroho. Sumber : World Labor Report, ILO; 1997-1998)



Lampiran 3

Jumlah Pemogokan di Indonesia (1950 - 2002)

Sumber: 1) Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Laporan Tahunan Ditjen "Binawas", 1975-2002;
2) King (1982) dikutip dalam Hadiz (1997). Grafik: Hari Nugroho



Lampiran 4

Jumlah Pekerja Terlibat dalam Pemogokan di Indonesia 1980 - 2004

Sumber: Depankertrans, Laporan Tahunan Ditjen "Binawas", 1980-2004. Grafik: Hari Nugroho

